**KEDUDUKAN ASAS HUKUM DI INDONESIA DINAMIKA PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Ari Bakti Windi Aji¹, Khatimul Fitri², Norman³

ABSTRAK

Legal principles are the fundamental guidelines in the formation of laws and regulations. This study aims to analyze the position of legal principles in the dynamics of law-making in Indonesia, as well as the impact of the application or neglect of legal principles on the quality and legitimacy of the resulting regulations. The research method used is normative legal research with a descriptive approach, which examines legal principles in law-making based on Law No. 12 of 2011 and related regulations. The research findings indicate that legal principles play a central role at every stage of law-making, from drafting to enactment. The application of legal principles such as legal certainty, justice, and transparency can improve the substance of regulations, strengthen legal legitimacy, and enhance public trust in the legal system. Conversely, neglecting legal principles can diminish the quality of regulations, reduce implementation effectiveness, and lead to public dissatisfaction that may result in social conflicts. This study emphasizes the importance of consistent application of legal principles in law-making to create a fair and responsive legal system.

Keywords: Legal Principles; Position or Status; Formation of Laws and Regulations

ABSTRAK

Asas hukum merupakan prinsip dasar dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan asas hukum dalam dinamika pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta dampak penerapan atau pengabaian asas hukum terhadap kualitas dan legitimasi peraturan yang dihasilkan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif, yang mengkaji asas hukum dalam pembentukan peraturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas hukum memiliki peranan sentral dalam setiap tahap pembentukan peraturan, mulai dari perancangan hingga pengesahan. Penerapan asas hukum seperti kepastian hukum, keadilan, dan transparansi dapat meningkatkan kualitas substansi peraturan, memperkuat legitimasi hukum, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Sebaliknya, pengabaian asas hukum dapat menurunkan kualitas peraturan, menurunkan efektivitas implementasi, dan memicu ketidakpuasan masyarakat yang berujung pada konflik sosial. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan asas hukum yang konsisten dalam pembentukan peraturan untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan responsif.

Kata Kunci: Asas Hukum; Kedudukan; Pembentukan peraturan Perundang-Undangan.

PENDAHULUAN

Asas hukum merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pembentukan dan penerapan hukum. Dalam konteks sistem hukum di Indonesia, asas hukum

¹ Dosen Insitut agama Islam Negeri Kerinci, email: aribakti82@gmail.com

² Dosen Insitut agama Islam Negeri Kerinci, email: fitrikhatimul@gmail.com

³ Dosen Insitut agama Islam Negeri Kerinci, email: arifnorman15@gmail.com

tidak hanya berfungsi sebagai pedoman, tetapi juga sebagai jaminan untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.⁴ Namun, dalam praktiknya, penerapan asas-asas hukum sering kali dihadapkan pada tantangan, seperti kurangnya pemahaman mengenai asas hukum di kalangan pembuat kebijakan dan pengabaian terhadap masukan masyarakat. Masalah ini memunculkan regulasi yang tidak responsif terhadap kebutuhan publik dan sering kali melahirkan ketidakpuasan masyarakat serta konflik sosial. Dengan kompleksitas masyarakat yang terus berkembang, penting bagi pembentukan peraturan perundang-undangan untuk mengakomodasi berbagai kepentingan dan nilai-nilai yang ada, agar dapat menghasilkan peraturan yang adil dan efektif.⁵ Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kedudukan asas hukum dalam dinamika pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta dampak penerapan atau pengabaian asas hukum terhadap kualitas dan legitimasi peraturan yang dihasilkan.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas pentingnya asas hukum dalam sistem perundang-undangan. Penelitian oleh (Mannan,2024) menekankan bahwa penerapan asas kepastian hukum dapat memperbaiki kualitas regulasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.⁶ Selain itu, penelitian oleh (Suteki,2022) menunjukkan bahwa pengabaian asas keadilan dapat menurunkan legitimasi sistem hukum dan memicu ketidakpuasan yang berujung pada ketidakstabilan sosial.⁷ Namun, penelitian-penelitian terdahulu umumnya hanya membahas asas hukum secara terpisah, tanpa mengaitkan penerapan asas-asas tersebut dalam keseluruhan proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini memiliki pendekatan yang lebih komprehensif, mengkaji kedudukan asas hukum di setiap tahapan pembentukan peraturan, dari perancangan hingga pengesahan, serta dampak penerapan atau pengabaian asas-asas tersebut terhadap kualitas dan legitimasi peraturan yang dihasilkan. Dengan demikian, penelitian ini layak untuk dilakukan guna memperdalam pemahaman tentang bagaimana penerapan asas hukum

⁴ Jeane Neltje and Indrawieny Panjiyoga, "Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum," *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 2034–39.

⁵ Benediktus Hestu Cipto Handoyo and M SH, *Prinsip-Prinsip Legislatif Dan Akademik Drafting: Pedoman Bagi Perancangan Peraturan Perundang-Undangan* (PT Kanisius, 2021).

⁶ Faidhul Mannan et al., "Exposing Discrepancies in Indonesia's Legislative Processes," *Indonesian Journal of Innovation Studies* 25, no. 2 (2024): 10–21070.

⁷ Suteki Suteki, "Hegemoni Oligarki Dan Ambruknya Supremasi Hukum," *CREPIDO* 4, no. 2 (2022): 161–70.

secara konsisten dapat menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas tentang bagaimana kedudukan asas hukum dalam dinamika pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Apa dampak penerapan atau pengabaian asas hukum terhadap kualitas dan legitimasi peraturan yang dihasilkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran asas hukum dalam setiap tahap pembentukan peraturan, serta mengidentifikasi implikasi penerapan atau pengabaian asas hukum terhadap kualitas peraturan dan penerimaan masyarakat.

Penerapan asas-asas hukum seperti kepastian hukum, keadilan, dan transparansi sangat penting dalam meningkatkan kualitas substansi peraturan, memperkuat legitimasi hukum, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada. Asas kepastian hukum, misalnya, menjamin bahwa peraturan yang diterapkan bersifat stabil dan dapat diprediksi, sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat dan pelaku usaha. Asas keadilan memastikan bahwa peraturan tidak hanya menguntungkan sebagian kelompok, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak individu dan kelompok yang lebih rentan. Sementara itu, asas transparansi berfungsi untuk membuka ruang bagi partisipasi publik, yang pada gilirannya memperkuat legitimasi dan akuntabilitas peraturan yang dihasilkan. Tanpa penerapan yang konsisten terhadap asas-asas ini, peraturan yang dihasilkan dapat menjadi cacat, baik dari segi substansi maupun prosedur, yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Misalnya, regulasi yang tidak adil atau tidak transparan dapat menyebabkan ketidakpuasan yang meluas di kalangan masyarakat, menciptakan ketegangan sosial, dan bahkan mendorong resistensi terhadap implementasi hukum. Dalam jangka panjang, pengabaian asas-asas hukum ini dapat menurunkan efektivitas sistem hukum itu sendiri, melemahkan otoritas negara, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga hukum. Oleh karena itu, penerapan asas-asas hukum yang kuat dan konsisten merupakan syarat mutlak bagi terciptanya sistem hukum yang adil, responsif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis kedudukan asas hukum dalam dinamika pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder,

yang meliputi sumber hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan literatur sekunder berupa buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan untuk mendalami konsep asas hukum dalam sistem legislasi Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yang melibatkan analisis terhadap dokumen hukum dan literatur ilmiah terkait dengan asas hukum dan proses legislasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis yuridis normatif. Analisis ini bertujuan untuk menilai konsistensi dan relevansi penerapan asas hukum dalam setiap tahap proses pembentukan peraturan perundang-undangan, serta untuk mengidentifikasi dampaknya terhadap kualitas substansi peraturan dan legitimasi sistem hukum di Indonesia.⁸

PEMBAHASAN

Asas hukum adalah prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan, pedoman, dan rujukan dalam pembentukan, penerapan, serta penafsiran hukum.⁹ Asas-asas ini tidak hanya berfungsi sebagai norma, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Oleh karena itu, asas hukum memainkan peranan penting dalam menciptakan sistem hukum yang efektif dan adil. Dalam konteks ini, asas hukum dapat diartikan sebagai kerangka konseptual yang memberikan arah dan makna terhadap berbagai peraturan dan kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif. Menurut para ahli, definisi asas hukum dapat bervariasi, tetapi inti dari pemahaman ini tetap sama.¹⁰

a. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa asas hukum adalah kaidah atau norma yang menjadi pedoman dalam berperilaku dan bertindak dalam masyarakat yang berfungsi untuk menegakkan keadilan dan keteraturan. Asas hukum ini menjadi landasan bagi pembuatan dan penerapan hukum, sehingga penting untuk memahami nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

⁸ Rusdin Tahir et al., *METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

⁹ Putu Bagus Dananjaya et al., *Dasar-Dasar Hukum: Pedoman Hukum Di Indonesia* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

¹⁰ Siti Halilah and Mhd Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli," *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. II (2021).

b. Sudikno Mertokusumo mengartikan asas hukum sebagai prinsip-prinsip yang menjadi dasar dari suatu sistem hukum yang memberikan arah dalam penegakan hukum dan membantu dalam menilai keadilan dari suatu peraturan. Ia menekankan bahwa asas hukum harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mencerminkan nilai-nilai sosial yang berlaku.

Secara lebih khusus, asas hukum mencakup berbagai nilai, seperti keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Misalnya, asas keadilan menuntut agar setiap individu diperlakukan secara adil tanpa adanya diskriminasi, sementara asas kepastian hukum mengharuskan setiap norma hukum memiliki kejelasan dan ketegasan agar masyarakat dapat memahami dan mematuhi. Selain itu, asas hukum juga mencakup prinsip-prinsip demokrasi, seperti transparansi dan partisipasi publik dalam proses legislasi, yang penting untuk memastikan bahwa hukum yang dihasilkan mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Ruang lingkup asas hukum dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia mencakup berbagai aspek yang saling terkait untuk menciptakan sistem hukum yang efektif dan responsif.¹¹

- a. Pengertian dan jenis asas hukum menjadi elemen fundamental, termasuk asas umum seperti kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sosial, serta asas spesifik yang berhubungan dengan bidang hukum tertentu.
- b. Proses pembentukan peraturan meliputi tahap perancangan, pembahasan, dan pengesahan, di mana asas hukum digunakan untuk merumuskan, menilai, dan menyetujui norma-norma yang diusulkan.¹²
- c. Penerapan asas hukum dalam penegakan hukum tetap relevan setelah peraturan disahkan, dengan pengadilan dan aparat penegak hukum berperan penting dalam memastikan keadilan dan konsistensi.
- d. Hubungan antara asas hukum dan masyarakat sangat penting, di mana partisipasi publik dalam proses legislasi membantu menciptakan hukum yang mencerminkan kebutuhan masyarakat.
- e. Evaluasi dan revisi peraturan juga menjadi bagian dari ruang lingkup, di mana asas hukum digunakan untuk menilai efektivitas dan relevansi peraturan yang ada.

¹¹ I Dewa Gede Atmadja, "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum," *Kertha Wicaksana* 12, no. 2 (2018): 145–55.

¹² Zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang* (Buku Mojok, 2022).

Asas hukum merupakan prinsip-prinsip fundamental yang menjadi landasan dalam pembentukan, penerapan, dan penafsiran hukum, serta mencerminkan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Asas hukum tidak hanya berfungsi sebagai norma, tetapi juga sebagai kerangka konseptual yang memberikan arah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Melalui pemahaman terhadap asas hukum, seperti keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia, sistem hukum dapat lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Proses legislasi di Indonesia melibatkan penggunaan asas hukum dalam setiap tahapan, mulai dari perancangan hingga evaluasi peraturan, serta pentingnya partisipasi publik dalam menciptakan hukum yang relevan dan adil.

1. Kedudukan asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia melibatkan beberapa tahap yang integral, yaitu perancangan, pembahasan, dan pengesahan.¹³ Dalam setiap tahap tersebut, asas hukum memegang peranan penting untuk memastikan bahwa hasil akhir tidak hanya sah secara legal, tetapi juga mencerminkan keadilan dan kepentingan masyarakat. Asas hukum berfungsi sebagai pedoman yang membantu pembuat undang-undang dalam merumuskan norma yang relevan, mendorong transparansi dan partisipasi publik, serta menjamin bahwa peraturan yang dihasilkan dapat diterima dan diimplementasikan dengan baik di masyarakat. Dengan demikian, penerapan asas hukum yang konsisten di setiap tahap tidak hanya meningkatkan kualitas peraturan yang dihasilkan, tetapi juga memperkuat legitimasi sistem hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Adapun kedudukan asas hukum dalam tahap pembentukan Undang-undang, yaitu:

a. Tahap Perancangan

Pada tahap perancangan, asas hukum menjadi pedoman utama bagi pembuat undang-undang dalam merumuskan norma-norma baru. Dalam konteks ini, asas-asas seperti kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sosial harus diinternalisasi dalam setiap rancangan regulasi.¹⁴ Pembuat undang-undang perlu melakukan analisis mendalam mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam asas hukum untuk

¹³ Noni Prihandini et al., "PERAN KELEMBAGAAN DALAM PENGGUNAAN KEWENANGAN DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN," *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2024): 54–64.

¹⁴ Diah Imaningrum Susanti and M Sh, *Penafsiran Hukum: Teori Dan Metode* (Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021).

memastikan bahwa rancangan tersebut tidak hanya sesuai dengan ketentuan yang ada, tetapi juga dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

Asas kepastian hukum menuntut agar setiap peraturan yang dirancang memiliki kejelasan dan ketegasan. Misalnya, dalam merancang undang-undang tentang perlindungan lingkungan, penting untuk mempertimbangkan asas keberlanjutan dan keadilan intergenerasional, yang menekankan perlunya melindungi hak generasi mendatang. Oleh karena itu, setiap rancangan perlu mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan masyarakat.

b. Tahap Pembahasan

Setelah rancangan peraturan disusun, tahap berikutnya adalah pembahasan. Pada tahap ini, asas hukum berfungsi sebagai alat evaluasi untuk menilai konsistensi dan relevansi dari norma yang diusulkan.¹⁵ Diskusi dan debat antara anggota legislatif, serta antara legislatif dan masyarakat, harus mempertimbangkan asas-asas hukum yang berlaku. Asas transparansi dan partisipasi publik sangat penting dalam tahap ini. Pembuat kebijakan perlu membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan pendapat, sehingga peraturan yang dihasilkan dapat lebih representatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses ini juga menciptakan akuntabilitas dan legitimasi, di mana masyarakat merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka.¹⁶

Misalnya, dalam pembahasan rancangan undang-undang tentang kesehatan, masukan dari para ahli kesehatan, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai isu-isu yang perlu diatur. Dengan demikian, asas hukum berfungsi untuk menjamin bahwa proses pembahasan dilakukan dengan cara yang terbuka dan inklusif, sehingga dapat mengurangi potensi konflik di kemudian hari.

c. Tahap Pengesahan

Tahap pengesahan adalah tahap akhir dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Di sini, asas hukum berperan dalam memastikan bahwa proses pengesahan dilakukan secara adil dan demokratis. Setiap peraturan yang disetujui

¹⁵ Uswatun Hasanah and Eny Suastuti, *Buku Ajar Teori Hukum (SCOPINDO MEDIA PUSTAKA, 2020)*.

¹⁶ Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 30, no. 1 (2014): 26–53.

harus memenuhi kriteria asas hukum, seperti keadilan dan kepastian hukum, agar dapat diterima oleh masyarakat. Proses voting dan keputusan akhir harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi dan hak-hak masyarakat yang terpengaruh oleh peraturan tersebut. Di sinilah pentingnya adanya mekanisme checks and balances, di mana setiap suara dan pendapat harus dihargai dan dipertimbangkan.¹⁷ Jika asas hukum diabaikan pada tahap ini, maka peraturan yang dihasilkan dapat dianggap cacat dan berpotensi menimbulkan konflik sosial.

Sebagai contoh, dalam pengesahan undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia, penting untuk memastikan bahwa semua pihak yang terdampak mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka. Hal ini tidak hanya memperkuat legitimasi hukum, tetapi juga menumbuhkan rasa keadilan di dalam masyarakat.

d. Evaluasi Pasca-Pengesahan

Setelah pengesahan, penting untuk terus menerapkan asas hukum dalam evaluasi efektivitas peraturan yang telah diundangkan. Asas-asas tersebut digunakan untuk menilai apakah peraturan yang ada masih relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Proses ini melibatkan pengumpulan data, analisis dampak, dan penyesuaian regulasi jika diperlukan. Evaluasi yang dilakukan secara rutin dapat membantu mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan dalam peraturan yang ada. Jika ditemukan bahwa suatu peraturan tidak lagi memenuhi asas-asas hukum yang telah ditetapkan, maka diperlukan revisi untuk memperbaikinya.¹⁸ Di sinilah peran masyarakat dan lembaga independen sangat penting dalam memberikan masukan untuk perbaikan regulasi yang berkelanjutan.

Asas hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bahwa asas hukum memainkan peran sentral dalam setiap tahap proses legislasi di Indonesia, mulai dari perancangan hingga evaluasi pasca-pengesahan. Asas hukum bertindak sebagai pedoman untuk merumuskan norma yang relevan, menilai konsistensi dan relevansi norma, serta memastikan bahwa proses pengesahan dilakukan secara adil

¹⁷ Adelia Fernanda Lawani, "Hubungan Eksekutif Dan Legislatif Dalam Pembuatan Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia," *Lex Administratum* 9, no. 2 (2021).

¹⁸ Risdiana Izzaty, "Urgensi Ketentuan Carry-Over Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia," *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 85–98.

dan transparan. Pada tahap perancangan, asas-asas seperti kepastian hukum dan keadilan harus diinternalisasi agar rancangan regulasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam tahap pembahasan, asas transparansi dan partisipasi publik penting untuk menciptakan akuntabilitas dan legitimasi. Sedangkan pada tahap pengesahan, asas hukum memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Evaluasi pasca-pengesahan juga penting untuk menilai efektivitas peraturan, dengan melibatkan masukan dari masyarakat untuk perbaikan berkelanjutan.

2. Dampak penerapan atau pengabaian asas hukum

Dampak penerapan atau pengabaian asas hukum dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas dan legitimasi peraturan yang dihasilkan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintah secara keseluruhan. Penerapan asas hukum yang konsisten dan tepat dapat meningkatkan kualitas substansi norma yang dihasilkan, memastikan bahwa peraturan tersebut tidak hanya sah secara formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kepentingan publik.¹⁹ Sebaliknya, pengabaian asas hukum dapat mengakibatkan peraturan yang cacat, ambigu, atau bahkan merugikan masyarakat, yang dapat menurunkan legitimasi hukum dan menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.²⁰ Oleh karena itu, penting untuk memahami secara mendalam bagaimana penerapan atau pengabaian asas hukum ini dapat berdampak pada efektivitas dan penerimaan peraturan di dalam masyarakat.

a. Dampak Penerapan Asas Hukum

1) Meningkatkan Kualitas Substansi

Ketika asas hukum diterapkan dengan baik, peraturan yang dihasilkan cenderung lebih berkualitas. Misalnya, asas keadilan dapat memastikan bahwa norma yang dihasilkan memperhatikan kepentingan semua pihak, bukan hanya segelintir kelompok. Hal ini memungkinkan peraturan untuk merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat secara lebih efektif, menciptakan rasa keadilan

¹⁹ S H Ani Purwati et al., *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek* (Jakad Media Publishing, 2020).

²⁰ Aan Eko Widiarto, "Ketidakpastian Hukum Kewenangan Lembaga Pembentuk Undang-Undang Akibat Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015): 735–54.

di dalam masyarakat, dan meminimalkan potensi konflik yang mungkin timbul akibat ketidakpuasan terhadap peraturan tersebut.²¹

2) Kepastian Hukum

Penerapan asas kepastian hukum dalam peraturan akan menghasilkan norma yang jelas dan dapat dipahami, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengikuti dan mematuhi peraturan tersebut. Ini mengurangi potensi konflik dan kebingungan di dalam masyarakat, serta memberikan jaminan bahwa setiap individu akan diperlakukan secara adil menurut ketentuan yang ada. Dengan kepastian hukum, masyarakat juga lebih termotivasi untuk mematuhi regulasi yang ditetapkan karena mereka memahami konsekuensi dari tindakan mereka.²²

3) Meningkatkan Legitimasi

Penerapan asas hukum yang baik, seperti partisipasi publik dan akuntabilitas, meningkatkan legitimasi peraturan di mata masyarakat. Ketika masyarakat merasa bahwa mereka dilibatkan dalam proses legislasi, mereka akan lebih cenderung menerima dan mematuhi peraturan tersebut. Hal ini menciptakan rasa memiliki terhadap peraturan yang dihasilkan, serta meningkatkan dukungan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.²³

4) Kepercayaan Masyarakat

Asas-asas hukum yang diterapkan secara konsisten akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif dan sistem hukum secara keseluruhan. Hal ini penting untuk menciptakan hubungan yang positif antara pemerintah dan warga negara, yang pada gilirannya dapat memperkuat stabilitas sosial dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Contoh nya, Di beberapa negara, penerapan asas hukum dalam pembentukan peraturan tentang perlindungan lingkungan telah menghasilkan regulasi yang efektif dan diterima masyarakat. Misalnya, regulasi yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi dampak lingkungan, sehingga

²¹ M Ilham F Putuhena, "Politik Hukum Perundang-Undangan Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Produk Legislasi," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 3 (2012): 343–60.

²² Nyoman Gede Remaja, "Makna Hukum Dan Kepastian Hukum," *Kertha Widya* 2, no. 1 (2014).

²³ Joko Riskiyono, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan," *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 6, no. 2 (2015): 159–76.

menghasilkan keputusan yang lebih adil dan berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat dalam proses ini tidak hanya meningkatkan kualitas keputusan, tetapi juga memperkuat komitmen masyarakat untuk mematuhi regulasi yang ditetapkan.

b. Pengabaian Asas Hukum

1) Menurunkan Kualitas

Pengabaian asas hukum dapat mengakibatkan peraturan yang cacat, ambigu, atau tidak relevan. Misalnya, jika asas transparansi diabaikan, proses pembuatan peraturan mungkin tidak melibatkan masukan dari masyarakat, sehingga peraturan yang dihasilkan tidak mencerminkan kebutuhan nyata. Hal ini dapat menyebabkan peraturan yang tidak efektif dan tidak sesuai dengan dinamika sosial yang ada, serta mengabaikan suara dan aspirasi masyarakat yang seharusnya menjadi pertimbangan utama.²⁴

2) Berkurangnya Efektivitas

Peraturan yang tidak didasarkan pada asas hukum yang kuat cenderung sulit diimplementasikan dan diikuti, karena masyarakat mungkin merasa tidak terlibat atau tidak diuntungkan oleh peraturan tersebut. Ketidakpuasan ini dapat mengarah pada pengabaian hukum, di mana masyarakat tidak lagi merasa perlu untuk mematuhi peraturan yang dianggap tidak adil atau tidak relevan.

3) Menurunkan Legitimasi

Jika asas hukum diabaikan, legitimasi peraturan dapat dipertanyakan. Masyarakat mungkin merasa bahwa peraturan tersebut tidak mencerminkan nilai-nilai dan kepentingan mereka, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan dan penolakan terhadap peraturan. Ketidaklegitiman ini dapat memicu skeptisisme terhadap lembaga legislatif dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

4) Konflik Sosial

Pengabaian asas hukum juga dapat menyebabkan konflik sosial, di mana masyarakat merasa terpinggirkan atau dirugikan oleh keputusan yang diambil tanpa mempertimbangkan suara mereka. Hal ini dapat memicu protes atau tindakan hukum yang lebih jauh, serta menciptakan ketegangan antara

²⁴ Fauzi Iswari, "Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia," *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 1 (2020): 127–40.

**KEDUDUKAN ASAS HUKUM DI INDONESIA DINAMIKA PEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN...
Ari Bakti Windi Aji, Khatimul Fitri, Norman**

pemerintah dan kelompok masyarakat yang merasa tidak diwakili, yang berpotensi mengganggu stabilitas dan keamanan sosial.²⁵

Contoh nya, Di sisi lain, pengabaian asas hukum dalam beberapa undang-undang yang berkaitan dengan hak asasi manusia dapat menyebabkan penolakan dari masyarakat, yang merasa bahwa hak-hak mereka tidak dilindungi. Hal ini berpotensi menimbulkan ketegangan dan konflik antara masyarakat dan pemerintah, serta dapat memicu gerakan protes yang lebih besar, yang mencerminkan ketidakpuasan mendalam terhadap pendekatan yang diambil oleh pemerintah dalam mengatur isu-isu penting tersebut. Ketidakpuasan ini sering kali berdampak jangka panjang terhadap hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta dapat menghambat proses reformasi yang diperlukan.

Dampak penerapan atau pengabaian asas hukum dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bahwa penerapan asas hukum yang konsisten dan tepat memiliki dampak positif yang signifikan, seperti meningkatkan kualitas substansi norma, kepastian hukum, legitimasi peraturan, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintah.²⁶ Dengan melibatkan nilai-nilai keadilan dan transparansi, peraturan yang dihasilkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan menciptakan rasa kepemilikan terhadap peraturan tersebut. Sebaliknya, pengabaian asas hukum dapat mengakibatkan peraturan yang cacat dan ambigu, menurunkan efektivitas implementasi, serta merusak legitimasi dan kepercayaan publik. Hal ini dapat memicu ketidakpuasan masyarakat, konflik sosial, dan penolakan terhadap peraturan, yang pada akhirnya mengganggu stabilitas sosial dan hubungan antara pemerintah dan warga negara.

KESIMPULAN

Asas hukum adalah prinsip fundamental yang menjadi landasan dalam pembentukan, penerapan, dan penafsiran hukum. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, penerapan asas hukum seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial sangat

²⁵ Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 305–25.

²⁶ Mannan et al., "Exposing Discrepancies in Indonesia's Legislative Processes."

penting untuk memastikan bahwa norma yang dihasilkan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga relevan, efektif, dan mencerminkan nilai-nilai masyarakat. Setiap tahapan dalam proses legislasi, mulai dari perancangan hingga evaluasi pasca-pengesahan, harus mencerminkan asas hukum agar peraturan yang dihasilkan dapat diterima dan diimplementasikan secara adil. Dengan penerapan asas hukum yang konsisten, sistem hukum dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, mendorong stabilitas sosial, dan memberikan kontribusi positif bagi kehidupan bermasyarakat. Sebaliknya, pengabaian asas hukum dapat menimbulkan ketidakpuasan masyarakat, konflik sosial, dan peraturan yang tidak efektif, sehingga mengurangi legitimasi pemerintah dan sistem hukum secara keseluruhan.

Untuk memastikan penerapan asas hukum yang optimal dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, diperlukan langkah-langkah konkret. Pertama, lembaga legislatif dan eksekutif harus menjadikan asas hukum, seperti keadilan, transparansi, dan kepastian hukum, sebagai pedoman utama dalam setiap tahap legislasi. Kedua, perlu adanya evaluasi yang berkelanjutan terhadap efektivitas peraturan yang sudah disahkan, agar relevansi dan manfaatnya tetap terjaga sesuai dinamika sosial. Ketiga, partisipasi publik harus ditingkatkan melalui konsultasi yang inklusif dan representatif, sehingga masyarakat merasa memiliki peraturan yang dihasilkan dan lebih berkomitmen untuk mematuhi. Terakhir, diperlukan penguatan kapasitas penegak hukum dalam memahami dan menerapkan asas hukum, guna memastikan keadilan dapat diwujudkan dalam praktik. Melalui langkah-langkah ini, sistem hukum di Indonesia diharapkan dapat lebih responsif, efektif, dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

REFERENSI

- Ani Purwati, S H, C P L MH, CCMs CPCLE, C T L CLA, and CMe CLI. *Metode Penelitian Hukum Teori Dan Praktek*. Jakad Media Publishing, 2020.
- Atmadja, I Dewa Gede. "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum." *Kertha Wicaksana* 12, no. 2 (2018): 145–55.
- Dananjaya, Putu Bagus, Khairina Khairina, I Made Adiwidya Yowana, B R Wahyudi, Zonita Zirhani Rumalean, Yulfa Mulyeni, Diana Pujiningsih, Liani Sari, Nur Asmarani, and Maria Fransiska Owa da Santo. *Dasar-Dasar Hukum: Pedoman Hukum Di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.

- Halilah, Siti, and Mhd Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli." *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4, no. II (2021).
- Handoyo, Benediktus Hestu Cipto, and M SH. *Prinsip-Prinsip Legislatif Dan Akademik Drafting: Pedoman Bagi Perancangan Peraturan Perundang-Undangan*. PT Kanisius, 2021.
- Hasanah, Uswatun, and Eny Suastuti. *Buku Ajar Teori Hukum*. SCOPINDO MEDIA PUSTAKA, 2020.
- Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16, no. 3 (2020): 305–25.
- Iswari, Fauzi. "Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 6, no. 1 (2020): 127–40.
- Izzaty, Risdiana. "Urgensi Ketentuan Carry-Over Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia." *Jurnal HAM* 11, no. 1 (2020): 85–98.
- Lawani, Adelia Fernanda. "Hubungan Eksekutif Dan Legislatif Dalam Pembuatan Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia." *Lex Administratum* 9, no. 2 (2021).
- Mannan, Faidhul, Isvandiari Muhammad Ramzy, Dominikus Rato, and Fendi Setyawan. "Exposing Discrepancies in Indonesia's Legislative Processes." *Indonesian Journal of Innovation Studies* 25, no. 2 (2024): 10–21070.
- Mochtar, Zainal Arifin. *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang*. Buku Mojok, 2022.
- Neltje, Jeane, and Indrawieny Panjiyoga. "Nilai-Nilai Yang Tercakup Di Dalam Asas Kepastian Hukum." *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 2034–39.
- Prihandini, Noni, Lulu Lutfiyah, Repiana Andani Hasan, Sartika Puspa Sekar Arum, Qinthara Faiz Taqiyyanfa, Real Figo Pratama, and Kuswan Hadji. "PERAN KELEMBAGAAN DALAM PENGGUNAAN KEWENANGAN DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 4, no. 2 (2024): 54–64.
- Putuhena, M Ilham F. "Politik Hukum Perundang-Undangan Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Produk Legislasi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 3 (2012): 343–60.

- Remaja, Nyoman Gede. "Makna Hukum Dan Kepastian Hukum." *Kertha Widya* 2, no. 1 (2014).
- Riskiyono, Joko. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Kesejahteraan." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 6, no. 2 (2015): 159–76.
- Susanti, Diah Imaningrum, and M Sh. *Penafsiran Hukum: Teori Dan Metode*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), 2021.
- Suteki, Suteki. "Hegemoni Oligarki Dan Ambruknya Supremasi Hukum." *CREPIDO* 4, no. 2 (2022): 161–70.
- Tahir, Rusdin, I Gde Pantja Astawa, Agus Widjajanto, Mompang L Panggabean, Moh Mujibur Rohman, Ni Putu Paramita Dewi, Nandang Alamsah Deliarnoor, Muhamad Abas, Rizqa Febry Ayu, and Ni Putu Suci Meinarni. *METODOLOGI PENELITIAN BIDANG HUKUM: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Usman, Atang Hermawan. "Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 30, no. 1 (2014): 26–53.
- Widiarto, Aan Eko. "Ketidakpastian Hukum Kewenangan Lembaga Pembentuk Undang-Undang Akibat Pengabaian Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 4 (2015): 735–54.